

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anderson, James E. 2000. *Public Policy Making*. Baston: Houghton Mifflin
- Arni, Muhammad. 2011. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Barkatullah, A. Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Third Edition. Terjemah, Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dye, Thomas R. 1976. *Policy Analysis: what governments do, why they do it, and what difference it makes*. New Jersey: Prentice Hall
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C. Congressional Quarterly Inc.
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*. Bantul: Thafa Media
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Makmur. 2016. *Konseptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi terhadap Kebijakan Publik*. Makassar: Aditama
- Mankiw, N, Gregory, dkk. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Rian. 2017. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo
- Pramono, B. dkk. 2006. *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia
- Purwanto, A. Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sjahrir. 1988. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Suyadnya, I. Wayan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman dari Lapangan*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan / atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
- Bank Indonesia. 2020. *Alat Pembayaran Menggunakan Kartu*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diakses 7 November 2020)
- Bank Indonesia. 2021. *Infrastruktur*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diakses 10 Mei 2021)
- Bank Rakyat Indonesia. 2021. *EDC Merchant*. [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) (diakses 10 Mei 2021)
- Kemenkeu RI. 2020. *APBN Kita*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diakses 7 November 2020)
- Kemenkeu RI. 2021. *Marketplace Pemerintah: Revolusi Industri 4.0 di Sektor Publik*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diakses 10 Mei 2021)
- Kemenkeu RI. 2021. *Profil Reformasi Birokrasi*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diakses 10 Mei 2021)
- Bank Indonesia. 2006. Seminar Internasional: *Toward a Less Cash Society in Indonesia*
- Bank Indonesia. 2006. Working Paper: *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*.
- Inayah. 2020. *Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam meminimalisir Kas Mengganggu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar*. IAIN Tulungagung.
- Insani, Istyadi. 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Bandung
- Kumari, Neetu. 2017. *Cashless Payment: A Behaviourial Change to Economic Growth*. International Journal of Scientific Research and Education. 5 (7) 6701-6710.
- Kurniati, N. Paramita. 2019. *Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Administrasi Publik. 9 (2) Desember 2019
- Novitasari, Tera. 2020. *Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang)*. Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.

- Pratama, A, Shandy. 2019. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49(3): 710-742
- Taasim, I, Shairil. 2017. *An Instrument Developing Cashless in Malaysia*. *Journal of Economics and Business*. 2503-4235 (p); 2503-4243 (e)
- Treasury Policy Brief. 2018. *Mengenal Kartu Kredit Pemerintah*. No. 9 (2018)
- World Bank Group. 2014. *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia, Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif*. Jakarta. World Bank